

PERANAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017

The Role of UN Women in Dealing With The Protection Of Violence Against Women In Indonesia at 2016-2017

Esi Rahmawati & Rafika Arsyad

(*Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban*
esirahmawati82@gmail.com & rafika.arsyad@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji tentang peran *United Nations Women* yang berisikan mengenai analisis perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran *UN Women* untuk menangani perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Serta teknik pengumpulan data secara sekunder dan primer yang di peroleh melalui studi kepustakaan dalam hal ini melalui sumber buku, artikel jurnal, *research paper*, *working paper*, basis atau arsip data resmi online, dan situs resmi. Dengan menganalisis menggunakan teori Konsep Organisasi Internasional. Selanjutnya, di skripsi ini *UN Women* fokus di Indonesia untuk melakukan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, dimana hal tersebut efektif dalam melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga di Indonesia yaitu *Wahid Foundation*. Hasil dari penelitian ini adalah dengan kerjasama tersebut, *UN Women* dan *Wahid Foundation* dapat membentuk program Desa Damai..

Kata Kunci : Kekerasan, Perempuan, Gender, *UN Women*.

Abstract

This paper will examine the role of *United Nations Women* which contains an analysis of the protection of violence against women in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the role of *UN Women* is to deal with the protection of violence against women in Indonesia. This research was conducted with qualitative methods and used a descriptive analysis approach. As well as secondary and primary data collection techniques obtained through literature studies in this case through book sources, journal articles, research papers, working papers, online official data bases or archives, and official websites. By analyzing using the theory of International Organization. In this essay, *UN Women* focuses on Indonesia to end violence against women, where it effective in collaborating with one of the institutions in Indonesia, namely the *Wahid Foundation*. The result of this research is that with this collaboration, *UN Women* and the *Wahid Foundation* can form the *Desa Damai* program.

Keywords: Violence, Women, Gender, *UN Women*.

PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, berbagai organisasi internasional telah muncul, berharap untuk memberikan keamanan dan perdamaian kepada dunia dan mencegah perang lebih lanjut. Salah satu organisasi yang menjadi pionir adalah *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini dihadiri oleh 50 negara dan perwakilan menghadiri Konferensi Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di San Francisco, Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri memiliki beberapa organisasi yang masing-masing berfokus pada isu-isu yang akan ditangani. Salah satu isu yang paling sering dialami dan dialami oleh sebagian besar perempuan dan anak di dunia adalah tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dalam hal ini organisasinya, *UN Women*. (Iqbal Ramadhan, 2018)

Dalam pernyataan entitas baru *UN Women* sebagai bagian dari misi PBB untuk menangani isu-isu di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menunjukkan pentingnya organisasi tersebut bagi perempuan di dunia. Oleh karena itu, *UN Women* tidak hanya ada di negara-negara yang telah melanggar hak asasi perempuan. Namun, *UN Women* juga membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di negara lain seperti Indonesia. *UN Women* merupakan organisasi yang resmi bekerja di Indonesia sejak tahun 1992. Keberadaannya telah memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dan telah menjadi mitra masyarakat sipil dalam menangani isu kesetaraan gender. Sebagai salah satu prioritas nasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas *UN Women* untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. (Galuh Artika Suri, 2020)

Indonesia yang merupakan negara dengan populasi jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan menjadi salah satu negara terluas di Asia Tenggara, memiliki tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998), yang juga seringkali disebut Komnas Perempuan menjadi lembaga perlindungan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan. Dari Komnas Perempuan mencatat bahwa di tahun 2016 ada total 259.150 kasus. Jumlah kasus ini terbilang sangat tinggi dengan 245.548 kasus bersumber pada kasus yang di tangani oleh 359 pengadilan agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. (Addi M. Idhom, 2017).

Namun di tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 348.446 kasus, dengan kasus atau kekerasan tertinggi terjadi di ranah privat atau personal. (Adhitya Himawan, Lili Handayani, 2018) Dengan kasus kekerasan yang meningkat tersebut, sehingga pada tahun 2017 di PBB terdapat pembahasan dunia yaitu penguatan hak

ekonomi perempuan melalui CSW 61 (*The Commission on The Status Of Women/Komisi Status Perempuan*). (Komnas Perempuan, 2017) Hal ini disebabkan masih tingginya kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini *UN Women* merasa perlu untuk membangun kesadaran berpikir dan merekonstruksi opini masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai manusia. Tentunya, *UN Women* harus secara langsung membangun *framework* bahwa kekerasan fisik ataupun non-fisik terhadap perempuan merupakan bentuk ancaman terhadap identitasnya sebagai manusia. Maka dari itu kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia diharapkan dapat di bendung dengan adanya peran *UN Women* didalamnya. (Iqbal Ramadhan, 2018)

Dari paparan tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai peran *United Nations Women* dalam upaya melakukan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis akan menggunakan *metode deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa wawancara, situs resmi FFF yaitu <https://www.unwomen.org> dan menggunakan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, berita, dan lain-lain. Dengan metode serta jenis data yang digunakan, penulis berusaha untuk memecahkan masalah yang pada prakteknya tidak membatasi diri pada pengumpulan serta penyusunan data saja, melainkan juga analisis dari interpretasi data yang sudah penulis dapatkan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menganalisis peran *UN Women* terhadap kekerasan perempuan di Indonesia. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional. Dalam konsep organisasi internasional, terdapat perbedaan klasifikasi fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson dan fungsi internasional menurut Karen Mingst, yaitu:

Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok :

- a. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat mempergunakan stafnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
- b. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum,

tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.

- c. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normative tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan ini hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
 - d. Fungsi pengawasan atau pelaksanaan peraturan dimana hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
 - e. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer. (Jacobson, 1979)
- Sedangkan Karen Mingst memberikan gambaran yang lebih luas lagi Mengenai fungsi organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh organisasi internasional baik itu di tingkat internasional negara, maupun individu (Mingst, 1990). Maka pada tingkat internasional, organisasi internasional berperan dalam:

- a. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara atau aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat saling bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.
- b. Menyediakan informasi dan pengawasan fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang *Collective Goods*, dimana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survey, dan juga pengawasan.
- c. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
- d. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
- e. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan *European Council Of Ministers* dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.
- f. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter eropa, dan lain-lain.

Sebagai suatu negara, organisasi internasional berfungsi sebagai :

- a. Instrumen bagi politik luar negeri, negara-negara berkembang memanfaatkan PBB untuk meratakan distribusi pembangunan.
- b. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri
- c. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara.
- d. Membatasi perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu dan menghukum terhadap negara yang mengambil tindakan salah.

Berikut pada level individu, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai :

- a. Tempat dimana individu dapat bersosialisasi terhadap norma-norma internasional.
- b. Tempat dimana individu menjadi tahu tentang persamaan dan perbedaan nasional.

Dengan demikian, *UN Women* memiliki peran di level pertama yaitu dalam sistem internasional. *UN Women* berkontribusi bersama negara-negara salah satunya adalah pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sehingga *UN Women* sebagai organisasi internasional dalam menjalankan peran dan tugasnya yang tertuang dengan melalui fungsi yang mencakup fungsi informasi, normatif, pembuatan peraturan, pengawasan dan operasional.

ANALISIS

A. Kinerja *UN Women* Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

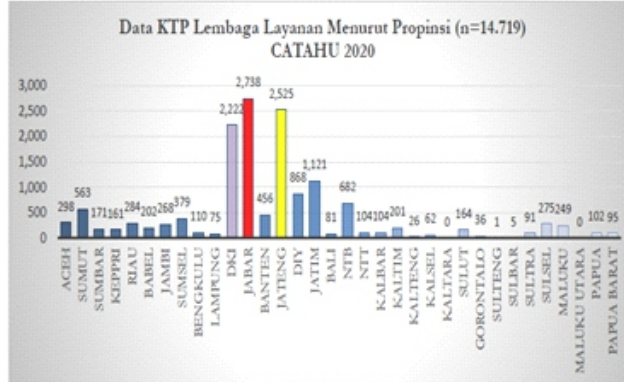
Perkembangan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih berlangsung disegala ruang, seperti domestik (rumah tangga) maupun publik, disegala waktu dan dilakukan oleh banyak orang. Dengan identitas sosial dan budaya yang beragam, dari yang dianggap sebagai “orang terhormat”, bahkan seorang yang terpelajar. Oleh sebab itu, terdapat salah satu gagasan untuk mengidentifikasi apakah identitas yang telah disebutkan diatas dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. (Harkrisnowo,, 2000)

Kemudian dalam hal ini, sebuah lembaga yang konsistensi pendokumentasian atau pencatatan kasus menunjukkan bagaimana kapasitas lembaga tersebut dalam menangani keamanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban perlu ditingkatkan dan didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Angka Kekerasan Perempuan Berdasarkan Provinsi di Indonesia

Rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di Provinsi, disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia. Selain itu ada rasa tidak aman yang dirasakan oleh korban yang akan melakukan laporan terhadap lembaga terkait. Berikut ini terdapat diagram angka kekerasan yang tercatat di lembaga terkait di berbagai provinsi di Indonesia.

Gambar 4.1
Anaka Kekerasan Berdasarkan Data Provinsi



Sumber: Kemenag, 2017

Berdasarkan data di atas memperlihatkan beberapa provinsi di Indonesia sangat rendah dalam jumlah laporan angka kekerasan. Namun dari tabel tersebut terdapat provinsi yang tinggi dalam laporan kekerasan, yaitu provinsi Jawa Barat. Tercatat sebanyak 2.738 jiwa yang melaporkan kasus kekerasan di Jawa Barat. Kemudian masih di pulau Jawa yaitu Jawa Tengah sebanyak 2.525 jiwa data yang masuk. Di DKI Jakarta tercatat sebanyak 2.222 jiwa. (Kemenag, 2017)

Dengan data diagram di atas dapat dilihat bahwa data menunjukkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak lah sama di setiap wilayahnya dan akan selalu berubah. Namun tidak dapat dihindarkan dengan keanekaragaman dan banyaknya pulau di Indonesia, tentu penyebaran lembaga pengada layanan terhadap kekerasan ini terbatas. Kemudian dalam melakukan sanksi atau denda bagi yang melakukan kekerasan dapat menggunakan hukum adat setempat.

B. Kerjasama *UN Women* dan Indonesia

Hubungan antara manusia dalam masyarakat meluas melewati batas-batas Negara dengan kemajuan di berbagai bidang turut mempengaruhi intensitas hubungan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai suatu komunitas masyarakat internasional, hubungan antar negara atau saling ketergantungan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, Negara-negara membutuhkan pembentukan wadah yaitu organisasi internasional. (Sri Setianingsih Suwardi, 2004)

Maka dengan beberapa bentuk diskriminasi seperti kekerasan terhadap perempuan tersebut mendorong *UN Women* sebagai salah satu entitas PBB untuk membantu korban diskriminasi kekerasan terhadap perempuan melalui beberapa upaya seperti pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. *UN Women* sendiri memiliki kantor sekretariat di setiap anggota negara yang tergabung dalam *UN Women*. Begitu juga di Indonesia terletak di ibu kota Jakarta. Tahun 2012 merupakan kunjungan resmi pertama Direktur Eksekutif *UN Women* yaitu Michelle Bachelet ke Indonesia.

Tabel 4.1

Peran *UN Women* di Indonesia

No.	Peran	UN Women	Pemerintah Indonesia	Program
1.	Sosialisasi	Memimpin dan mengoordinasikan pekerjaan sistem PBB tentang kesetaraan gender, serta mempromosikan akuntabilitas, termasuk pemantauan berkala atas kemajuan seluruh sistem	Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan (penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosia, pelayanan bantuan hukum, dan reintegrasi sosial	The Komisi Status Perempuan (CSW) adalah kepala badan antar-pemerintah global yang khusus didedikasikan untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2.	Advokasi	Mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti Komisi status perempuan, dalam perumusan kebijakan, standar global dan norma-norma.	Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan	Say NO-UNiTE untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap perempuan
3.	Membangun mitra	Membangun negara-negara anggota menerapkan standar-standar ini, siap untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai untuk negara-negara yang memintanya, dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil	Perlindungan hak perempuan merupakan kegiatan lintas sektor (<i>cross cutting issues</i>), dimana peran serta para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, kepolisian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa sangat menentukan keberhasilan upaya perlindungan terhadap perempuan.	Count Making Every Women and Girl didanai dengan murah hati oleh pemerintah Australia, Irlandia dan Amerika Serikat dan Yayasan Bill and Melinda Gates

Sumber: <https://www.unwomen.org>

C. Strategi *UN Women* Dalam Menangani Permasalahan Kekerasan Perempuan di Indonesia

UN Women sudah memberi dukungan kepada pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, publik dan sektor swasta sejak *UN Women*. Tujuan yang ingin dicapai *UN Women* di Indonesia adalah untuk menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Area prioritas tambahan dari *UN Women Country Office in Indonesia* adalah Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Kantor tersebut mendukung Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam proses perdamaian yang berkelanjutan.

1. Implementasi Kampanye *Heforshe* di Indonesia

Kampanye *Heforshe* merupakan sebuah kampanye yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibawah naungan *UN Women* untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kampanye *Herforshe* ini untuk meningkatkan konsentrasi pada persepsi atau pandangan kemajuan global yang tidak merata sehingga kemajuan tersebut menghapus kesetaraan gender. Kampanye *Heforshe* juga diikuti banyak laki-laki yang ingin mendukung akan kesetaraan gender (Annisa, 2021).

Gambar 4.2
Program kampanye *HeForShe*



Sumber: CNN Indonesia

Program kampanye *HeForShe* pada gambar 4.2 dihadiri oleh beberapa negara anggota Uni eropa dengan menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung kampanye *HeForShe*, dimana komitmen *HeForShe* sendiri yang mengajak keterlibatan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender antara lain untuk mempromosikan upaya mempercepat pemberdayaan perempuan, partisipasi, dan menghapus kekerasan berbasis gender. Kampanye *Heforshe* ini sudah dibentuk sejak 20 September 2014 oleh Direktur Eksekutif Wanita PBB, Pumzile Mamblo Ngcuka.

Di Indonesia, Kampanye *HeforShe* diharapkan akan membawa sesuatu dengan tujuan dari Kampanye *HeforShe* yaitu mewujudkan Kesetaraan Gender. Komitmen yang dibentuk oleh Kampanye *HeForShe* untuk mengajak keterlibatan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender antara lain mempromosikan upaya mempercepat pemberdayaan perempuan, partisipasi dan menghapus kekerasan berbasis gender serta harus membawa perempuan Indonesia ke negara-negara lain. Indonesia adalah salah satu Negara yang memberi dukungan penuh kepada Kampanye *HeForShe* ini dikarenakan Presiden Joko Widodo adalah salah satu

presiden yang menjadi *Head of State Impact Champion* di Kampanye *HeForShe*. (Annisa, 2021)

Setelah mendapatkan hak-hak nya, perempuan di Indonesia akan menjadi lebih aktif lagi baik dalam bidang sosial yang dimana mereka akan mendapat kesempatan untuk bersosialisasi. Kemudian dalam bidang ekonomi, perempuan akan mendapatkan kesempatan lebih banyak menciptakan ekonomi kreatif lagi. Begitu juga pada bidang politik perempuan akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapasitas caleg dengan cara pelatihan.

2. Kerjasama *UN Women* Dengan Pemerintahan Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Rasa Aman Bagi Perempuan

Kerjasama *UN Women* dengan pemerintah Indonesia mencapai pada tahap menciptakan rasa aman terhadap perempuan. Tahapan-tahapan tersebut memasuki sebuah program yang dilakukan oleh *UN Women* yaitu:

a. Program *Three Ends*

Program *Three Ends* adalah program yang memiliki tujuan untuk menghentikan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, perdagangan manusia dimana perempuan dan anak-anak sebagai korban, serta hambatan ekonomi, kesetaraan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak. Program *Three Ends* diluncurkan pada 2015 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu program unggulan oleh Kemenpa (Annisa, 2021)

Strategi utama yang program *Three Ends* adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi korban kekerasan. Dalam program ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan peningkatan kapasitas bagi petugas lapangan di instansi terkait dalam penanganan dan pelaporan KTP, pengetahuan tentang proses hukum dan pemberian bantuan hukum, penyediaan layanan kesehatan terkait, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban dan keluarganya. Program ini juga berupaya memberdayakan perempuan korban kekerasan dengan memberikan pelatihan termasuk ekonomi dan kewirausahaan (Annisa, 2021)

Gambar 4.3

Pelatihan ekonomi dan kewirausahaan



Sumber: Liputan6

Unggahan yang dilaporkan liputan6 pada gambar 4.3 ini adalah salah satu bentuk dari program *Three Ends* yang dilakukan oleh pemerintah mengingat akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas, maka dari itu, pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memastikan menjalankan program pelatihan bagi perempuan. Selain itu dalam program ini pemerintah juga memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan dan pemerintah juga menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan yang akan memulai usaha.

Kemudian cara yang dilakukan *HeForShe* adalah menyesuaikan target untuk peningkatan jumlah, dan layanan korban yang diberikan oleh agen dan pekerja sosial. Dengan meningkatkan jumlah unit layanan dari 247 di tahun 2014 menjadi 429 unit di tahun 2016 dan mempermudah transportasi dengan adanya membeli kendaraan baru untuk meningkatkan jangkauan di daerah terpencil. Sosialisasi juga dilakukan diberbagai daerah untuk mengkampanyekan program *Three Ends*.

Gambar 4.4

Penyerahan layanan transportasi



Sumber: republiko.co.id

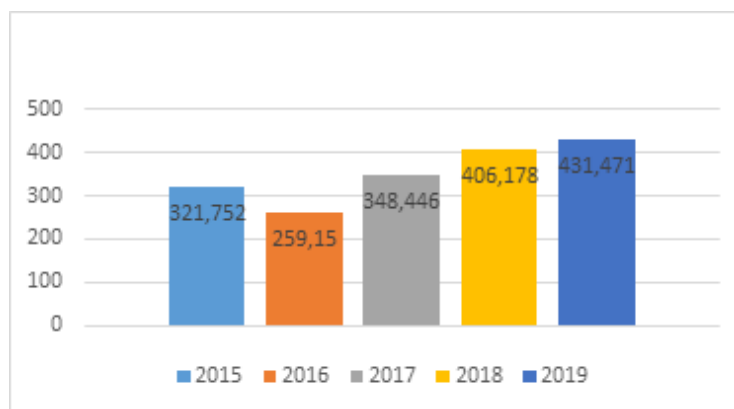
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Yohana Yambise telah meluncurkan layanan transportasi untuk menjangkau korban kekerasan di daerah terpencil dan untuk memudahkan penjangkauan masyarakat terkait pencegahan, penanganan kekerasan, dan perlindungan perempuan dan anak.

b. Program *Safe Cities*

Pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum membuat Perempuan ketakutan akan hal itu yang mengakibatkan membatasi kebebasan bergerak dan kesempatan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Sebagai tanggapan, *UN Women* meluncurkan program *safe cities and public places* di Indonesia pada 2016 untuk mendukung menyuarakan kampanye *HeForShe* di Indonesia yang menjadi salah satu duta dari kampanye tersebut.

Dengan adanya kegiatan kampanye tersebut dapat dilihat bagaimana jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2016 menurun dari tahun sebelumnya. Data tersebut dapat dilihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.2
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019
Dalam Catatan Tahunan 2020



Sumber: Komnas perempuan, 2020

Penulis menganalisa grafik tersebut bahwa terlihat signifikan dari usaha-usaha *UN Women* dari dalam perannya sebagai organisasi internasional dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan periode 2016-2017, khususnya dalam program *Safe Cities and Safe Public Spaces*. Menurut penulis pada tahun 2015 atau satu tahun sebelum adanya program *Safe Cities and Safe Public Spaces* yang diimplementasikan, nampak tinggi kekerasan terhadap perempuan hingga mencapai 321,752. Pada tahun 2016 setelah adanya program.

Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 348,444.

Menurut penulis peningkatan ini terjadi karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan, yang mana ditahun yang sama *UN Women* melakukan *Safety* auditnya di banyak kota besar. Sehingga naiknya angka kekerasan di tahun tersebut bersamaan dengan naiknya pula laporan kepihak yang berwajib yang kemudian masuk kedalam catatan komnas perempuan. Setelah adanya kenaikan angka kasus tersebut akibat banyaknya pelaporan, dapat dipastikan pada tahun-tahun setelahnya pelaporan tidak akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyak dan masifnya kerja-kerja dari *UN Women* serta elemen penting di Indonesia maka semakin banyak pula yang semakin sadar untuk melaporkan kasus. (komnas perempuan, 2020).

Grafik dengan fluktuasi seperti ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama/intervensi serta segala yang telah dilakukan *UN Women* dalam penelitian ini sangatlah mempengaruhi angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, yang mana jika bukan karena adanya usaha yang dilakukan dari *UN Women* maka grafik tersebut tidak mungkin mengalami kenaikan satu tahun setelah adanya program dan penurunan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Setelah adanya usaha yang serius dari *UN Women* maka grafik ini dapat membuktikan serta sejalan dengan kinerja dalam usaha-usahanya tersebut, yang mana sebelumnya telah dijelaskan secara rinci.

D. Keberhasilan *UN Women* Dalam Menciptakan Strategi Dalam Menangani Kekerasan Perempuan di Indonesia

UN Women bergerak sebagai organisasi yang menciptakan keadilan bagi perempuan di dunia, begitu pula di Indonesia. Dalam kerjasama dengan Indonesia, *UN Women* juga menjadi salah satu penggerak masyarakat Indonesia betapa bahayanya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hal tersebut membuat *UN Women* untuk terus dapat membantu Indonesia dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. *UN Women* menghasilkan kerjasama dengan salah satu lembaga di Indonesia yaitu Wahid Foundation. Dan dengan kerjasama tersebut, *UN Women* dan Wahid Foundation membentuk program Desa Damai (Wahid Foundation., 2018).

Program Desa Damai didirikan sejak tahun 2016, karena mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat di tahun 2016. *UN Women* yang menggandeng Wahid Foundation ini melaksanakan program Desa Damai dengan tujuan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Selain itu, program Desa Damai tersebut berhasil menggandeng tiga Provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur (Wahid

Foundation., 2018).

Keberhasilan dari adanya program Desa Damai terlihat dari bagaimana Desa Damai dapat memajukan kepemimpinan perempuan. Dengan adanya program Desa Damai akan membuat perempuan lebih percaya diri dalam menciptakan jiwa kepemimpinan yang ada pada dirinya. Memajukan kepemimpinan perempuan memang tidak mudah karena ada juga pihak maupun oknum yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa atau tidak pantas untuk jadi pemimpin. Namun adanya Indonesia yang bekerjasama dengan *UN Women* dapat membuat perempuan lebih aktif dalam kepemimpinan, baik itu dalam bidang politik. Hal tersebut akan membuat perempuan juga lebih aktif dalam bersosialisasi dengan masyarakat luar (Sulaeman, 2015).

Sehingga perempuan dalam dunia kerja mendapatkan posisi yang layak dan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki. Kemudian dalam kegiatan pekerjaan, perempuan dapat melakukan pekerjaan secara produktif dan berdampak pada percepatan pertumbuhan dengan kinerja yang profesional dan tepat sasaran. Kinerja yang tinggi ini, dapat mempengaruhi peran *UN Women* dalam mengurangi resiko perempuan mendapatkan kekerasan. Maka berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan dalam melakukan program Desa Damai di beberapa daerah.

Gambar 4.5

Kegiatan Perempuan Dalam Program Desa Damai



Sumber: wahidfoundation.org

Bentuk ungghahan yang dilakukan oleh *Wahid Foundation* bersama *UN Women* tampak pada gambar 4.4 yaitu telah mengunjungi desa yang ada di beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang diunggah pada 31 Oktober 2017 dimana hal ini merupakan dari pembentukan kampung Damai untuk meningkatkan usaha masyarakat setempat dalam menciptakan ekonomi kreatif bagi perempuan.

Dengan demikian peran *UN Women* dalam menghentikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia antara lain memberikan pelatihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pelayanan bantuan hukum. Selain itu *UN Women* ini juga berperan sebagai pemberdayaan ekonomi agar perempuan dapat

menciptakan ekonomi kreatif lagi. Walau pun demikian masih terdapat tantangan dan beberapa hal yang menghambat akan terwujudnya suatu keberhasilan dalam strategi yang dilakukan oleh *UN Women*, dalam pelaksanaannya *UN Women* masih mengalami beberapa hambatan yang menghambat kinerja dalam menangani kasus kekerasan di Indonesia.

E. Tantangan dan Hambatan Implementasi Program *UN Women* Dalam Isu Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Dalam melakukan peran organisasi internasional tidak selalu mulus, namun terdapat dinamika yang dialami seperti halnya dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Meskipun demikian, *UN Women* masih mengalami beberapa tantangan dalam menanggulangi kasus tersebut. Di antaranya masih adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan mengalami kekerasan secara fisik dan seksual yang mengakibatkan para perempuan tertekan dan dikucilkan baik di lingkungan masyarakat, tempat kerja dan lainnya. Selain itu dengan adanya penghapusan RUU Kekerasan Seksual juga menjadi kontroversi, padahal RUU ini dapat menjadi salah satu pengaturan untuk memastikan adanya akses keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. (Budiarti, 2021)

Rendahnya perlindungan terhadap perempuan juga menjadikan tantangan bagi *UN Women*. Seperti rendahnya laporan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dengan ketergantungan korban maupun saksi atas keamanan kerja dan sumber pendapatannya yang berasal dari tempat kerjanya. Ketergantungan tersebut membuat korban dan saksi enggan untuk melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan yang dialami. (Purnamasari, 2021)

Meskipun dengan demikian terdapat juga beberapa hambatan yang muncul dalam keberhasilan *UN Women*. Diman dalam menciptakan strateginya terhadap menangani kekerasan perempuan di Indonesia. Di antaranya tradisi masyarakat yang membatasi peran perempuan, dimana kebudayaan masih sangat berpengaruh dalam status perempuan. Hal ini masih terlihat di masyarakat pedesaan/plosok, yang dimana desa masih menerapkan sistem adat dan kebudayaan yang menempatkan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Masih banyaknya kaum perempuan yang tidak di ijin keluar rumah tanpa di sertai laki-laki dari keluarga hanya untuk menerima pendidikan atau pekerjaan.

Rendahnya dukungan masyarakat atau keluarga terhadap penyeteraan gender, di kalangan masyarakat pedesaan, pihak keluarga merupakan pendukung utama penyeteraan gender, karena biasanya faktor diskriminasi yang dialami perempuan dari pihak keluarga berupa larangan untuk sekolah tinggi, dan ditambah faktor kemiskinan yang mempengaruhi keluarga untuk lebih mengutamakan anak laki-laki harus mendapatkan pendidikan, karena

beranggapan bahwa anak perempuan lemah.

Dengan demikian tantangan dan hambatan-hambatan yang telah disebutkan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga menjadi upaya yang dapat terlaksana dengan efektif dalam menghadapi hambatan yang dihadapi dalam keberhasilan *UN Women* dan menjadi cara ataupun strategi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

United Nations Women merupakan badan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dibawah naungan PBB. *UN Women* merupakan organisasi yang resmi bekerja di Indonesia sejak tahun 1992. *UN Women* sendiri memiliki kantor sekretariat di setiap anggota negara yang tergabung dalam *UN Women*. Begitu juga di Indonesia terletak di ibu kota Jakarta. Terbentuknya *UN Women* dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jendral PBB terhadap resolusi majelis umum PBB 63/311 yang berisi tentang memperkuat pengaturan kelembagaan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan kehadirannya telah memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia serta menjadi mitra masyarakat sipil dalam menangani isu kesetaraan gender. Sebagai salah satu isu yang menjadi prioritas nasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi fokus *UN Women* untuk mengakhiri kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Selain itu, *UN Women* tidak hanya hadir di berbagai negara yang mengalami pelanggaran HAM terhadap perempuan. Namun, *UN Women* juga hadir di negara lain seperti Indonesia dalam membantu menangani sebuah kasus kekerasan terhadap perempuan. Beberapa langkah yang dilakukan *UN Women* dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia diantaranya *UN Women* mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi nasional untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan salah satunya bekerja sama dengan penegak hukum seperti badan penelitian, pengembangan, pendidikan, penelitian hukum dan peradilan mahkamah agung republik indonesia untuk mendukung sistem peradilan serta mendorong pemenuhan hak asasi perempuan yang bebas dari kekerasan.

Hasil dari penerapan kerjasama *UN Women* di Indonesia salah satunya yaitu dengan Wahid Foundation dan membentuk program Desa Damai dengan tujuan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Dengan adanya lembaga Wahid Foundation ini membuktikan bahwa *UN Women* dapat melakukan perannya dengan mudah, sehingga lembaga ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Indonesia.

Keberhasilan dari adanya program Desa Damai terlihat dari bagaimana Desa Damai dapat memajukan kepemimpinan perempuan. Dengan adanya program Desa Damai akan membuat perempuan lebih percaya diri dalam menciptakan jiwa kepemimpinan yang ada pada dirinya. Namun adanya Indonesia yang bekerjasama dengan *UN Women* dapat membuat perempuan lebih aktif dalam kepemimpinan, baik itu dalam bidang politik. Hal tersebut akan membuat perempuan juga lebih aktif dalam bersosialisasi dengan masyarakat luar.

Meskipun dengan demikian terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam keberhasilan *UN Women* terhadap menciptakan strateginya dalam menangani kekerasan perempuan di Indonesia. Di antaranya tradisi masyarakat yang membatasi peran perempuan, dimana kebudayaan masih sangat berpengaruh dalam status perempuan.

Rendahnya dukungan masyarakat atau keluarga terhadap penyeteraan gender, di kalangan masyarakat pedesaan, pihak keluarga merupakan pendukung utama penyeteraan gender, karena biasanya faktor diskriminasi yang dialami perempuan dari pihak keluarga berupa larangan untuk sekolah tinggi. Keterbatasan pengetahuan perempuan menyangkut peraturan hak gender, walaupun perempuan sudah mulai ada yang bekerja sebagai pegawai sipil, dan aktivis untuk hak perempuan yang berjuang menjamin kesetaraan dengan laki-laki di tengah masyarakat.

Peran *UN Women* dalam menghentikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup efektif dimana bisa memberikan pelatihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, pelayanan kesehatan, rehabilitas sosial, dan pelayanan bantuan hukum. Selain itu *UN Women* ini juga berperan sebagai pemberdayaan ekonomi agar perempuan dapat menciptakan ekonomi kreatif lagi. Walau pun demikian masih terdapat beberapa hal yang menghambat akan terwujudnya suatu keberhasilan dalam strategi yang di lakukan oleh *UN Women*, dalam pelaksanaannya *UN Women* masih mengalami beberapa hambatan.

Dengan demikian tantangan dan hambatan-hambatan yang telah disebutkan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga menjadi upaya yang dapat terlaksana dengan efektif dalam menghadapi hambatan yang dihadapi dalam keberhasilan *UN Women* dan menjadi cara ataupun strategi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia. [].

DAFTAR PUSTAKA

- Addi M. Idhom . (2017). Terdapat 259.150 Kasus Kekerasan Ke Perempuan Selama 2016. Jakarta: tirta.id.
- Adhitya Himawan, Lili Handayani. (2018). Ada 348.446 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di 2017. Jakarta: suara.com.
- Annisa, F. N. (2021). Upaya United Nations Women (Un Women) Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Kampanye Heforshe Di Indonesia Tahun 2016-2019 . Jurnal Fisip Vol li Edisi 8, 1-15.
- Budiarti, A. I. (2021, April 20). RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prioritas DPR, tapi masyarakat masih memiliki pemahaman berbeda-beda. Retrieved from The Conversation: <https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas-dpr-tapi-masyarakat-masih-memiliki-pemahaman-berbeda-beda-158303>
- Galuh Artika Suri. (2020). Peran United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017. Jurnal Politik Indonesia dan Global, 30-40.
- Iqbal Ramadhan. (2018). Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. Asia Pasific Studies JAPS, 145 - 162.
- Jacobson, H. K. (1979). Networks of Interdependence. Alfred A Knopf, New York, 89-90.
- Komnas Perempuan. (2017, Maret 7). Labirin Kekerasan terhadap Perempuan : Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. Jakarta: Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2017.
- Komnas Perempuan. (2020). kekerasan meningkat: kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. jakarta: catatan tahunan.
- Mingst, K. (1990). Essentials of International Relations. WW Norton & Company, 241-245.
- Purnamasari, D. M. (2021, Juli Kamis, 1). Penyebab Rendahnya Laporan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja Terkait Sumber Pendapatan. Retrieved from

K o m p a s . c o m :
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/01/16004151/penyebab-rendahnya-laporan-kekerasan-dan-pelecehan-di-tempat-kerja-terkait>

Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan da-lam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Setianingsih Suwardi. (2004). pengantar hukum organisasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sulaeman. (2015). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologi. In Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan. Bandung : Refika Aditama

Wahid Foundation. (2018). Laporan Survei Nasional Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia. Jakarta

Women, U. (n.d.). <http://asiapacific.unwomen.org>. UN women. Retrieved from <http://asiapacific.unwomen.org>

REPUBLIK.co.id. (2016, oktober 21). in picture: jangkau korban kekerasan di daerah terpencil dengan molin dan torlin. Retrieved from m.republika.co.id: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/ofeh8h314>

Perdana, A. J. (2018, april 20). pemerintah gencarkan program three end untuk atasi masalah bagi pekerja perempuan . Retrieved from Liputan6: <https://m.liputan6.com/health/read/3473010/pemerintah-gencarkan-program-three-end-untuk-atasi-masalah-bagi-pekerja-perempuan>

Foundation, W. (2017, november 22). membangun asa ibu-ibu di desa: catatan wahid foundation bersama perempuan sukoharjo. Retrieved from [Wahidfoundation.org](http://wahidfoundation.org): <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Membangun-Asa-Ibu-Ibu-di-Desa-Catatan-Program-Wahid-Foundation-Bersama-Perempuan-Sukoharjo>

Foundation, W. (2017, november 2). perluas jaringan kampung damai, wahid foundatio jamah desa-desa bogor. Retrieved from [Wahid Foundation](http://wahidfoundation.org): <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Perluas-Jaringan-Kampung-Damai-Wahid-Foundation-Jamah-Desa-Desa-Bogor>